



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 129/E-12/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Gianyar Nomor 846/05-F/HK/2014 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa daftar Informasi publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor486);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tahmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2007 Nompur 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5

MEMUTUSKAN:

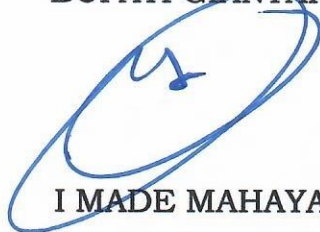
Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelola dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 2.10.2.10.01.18.07
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Inspektur Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Gianyar
6. Yang Bersangkutan Untuk Diindahkan dan Dilaksanakan
7. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 129/E-12/HK/2020

TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN					
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR					
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	HASIL UJI KONSEKUENSI	
			PENGECUALIKAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
KEARSIPAN					
1	Arsipan daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h dan huruf j; -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persejuaan dari orang bersangkutan/pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Arsip Peta Foto Udara	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf dj; -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;	Sealamat didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i; -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokais terjaga
4	Arsip dinamis,aktif dan dinaktif, yang berisikan:	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17			

	<p>a. Dokumen keuangan: -SPJ berikut lampirannya -Dokumen anggaran dan otorisasinya -Surat pencairan anggaran</p> <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelembagaan/perorangan</p> <p>c. Data informasi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. Data kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>g. Memorandum/surat-surat yang penting yang perlu dirahasiakan</p>	<p>-UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 44 ayat(1) dan (2);</p>	<p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlangsung penyelenggaraannya</p> <p>Selama status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p>	<p>Menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual</p> <p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan</p>	<p>Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Melindungi kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Melindungi peraturan pangan dan tidak menimbulkan keawatiran masyarakat</p>
--	---	---	--	---	---

			Selama masih berlaku	masyarakat Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Menggangu proses pelaksanaan kegiatan	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
5	Disposisi surat pimpinan	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindakan lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyumbatan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG KEPENDUDUKAN					
6	Data Pribadi Penduduk	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i; -UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,pasal 84 ayat (1) dan (2),pasal 85 ayat (1),(2),dan(3)	Sampai tertibnya keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Data mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.
BIDANG KEPEGAWAIAN					
7	Rincian hasil uji kompetensi PNS	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17	Sampai ada persetujuan tertulis	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi seorang

		huruf h	dari tenaga pengajar yang dievaluasi	seorang PNS	PNS
9	Data Hasil Chek Up Perorangan PNS/Pejabat	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	Data hasil evaluasi kinerja PNS/Pejabat	-UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11	Data Hasil Tes Potensi /Kompetensi PNS/Pejabat	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12	Identitas PNS yang diduga melanggar kedisiplinan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai data keputusan tetap	-Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	-Memperlancar proses penegakan hukum -Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
13	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai penyerahan SK	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen hasil sidang Baperjaka(notulen,pertimbangan/rekomendasi,daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	-Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang PNS -Dapat menggggu	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

				proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
15	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	-Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	-Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	-Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/meng	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

			(pelanyikan)	hambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
18	Instrumen tes Potensial/Kompetensi PNS/Pejabat	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensial/kompetensi PNS/Pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19	Hasil identifikasi potensi PNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan -Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Soal Tes CPNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

22	Data nilai dan ranking peerta ujian tertulis selesai CPNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat peoses penyusunan kebijakan - Dapat menggungkap rahasia pribaddi seseorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
23	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	- Dapat menghambat peoses penyusunan kebijakan - Dapat menggungkap rahasia pribaddi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
24	Dokumen pengangkatan,pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	- Dapat menghambat peoses penyusunan kebijakan - Dapat menggungkap rahasia pribadiseorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
25	SK pengangkatan,pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17	Selama proses penetapan SK sampai	- Dapat menghambat	- Mengamankan proses penyusunan

	sebagai Kepala Sekolah	huruf i	dengan mulai berlakunya SK	peoses penyusunan kebijakan	kebijakan
26	Dftar Nilai DP3 PNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27	Keputusan Pejnatuhan Hukuman	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf a,huruf h,dan huruf i	Sampai dengan persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat peoses penegakan hukum - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat peoses penyusunan kebijakan	-Membantu melancarkan proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat peoses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

29	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
30	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU NO.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)
31	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c;	Selama masih berlaku	- Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
33	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
34	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jasa)	Dapat menghambat proses penegakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum

				hukum	
BIDANG PEREKONOMIAN					
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 6 ayat(3) hurup b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-Melindungi calon penerima bantuandari persaingan usaha yang tidak sehat -Mengamankan proses penyusunan kebijakan
36	Rencana alokasi bersubsidi	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 6 ayat(3) hurup b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-Melindungi calon penerima bantuandari persaingan usaha yang tidak sehat -Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	-Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAH					
38	Kajian Pemerintah Pusat dan	- UU NO .14 Tahun 2008	Sampai dengan	-Dapat	-Melindungi

	Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	tentang KIP,Pasal 17 huruf e dan huruf i	penyelesaian proses pelepasan Tanah Kas Desa	merugikan ketahanan ekonomi nasional -Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	ketahanan ekonomi nasional -Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	-Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional -Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	-Melindungi ketahanan ekonomi nasional -Mengamankan proses penyusunan kebijakan
40	Berasan harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	-Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional -Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	-Melindungi ketahanan ekonomi nasional -Mengamankan proses penyusunan kebijakan

				pengungkapan secara prematur	
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	-Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional -Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	-Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai penertiban keputusan	-Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan Mandagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/ Pemimpin DPRD	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahn SK	-Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

				pengungkapan secara prematur	
44	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Bali tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pemimpin DPRD	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai penertiban keputusan	-Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45	Penyaringan Bakal Calon Kepla Desa	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualian	-Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pwenyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualian	-Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					
47	Berita sandi	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Salam berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Spesifikasi saran komunikasi sandi	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	Perangkt khusus persandian	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Kunci sistem sandi	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17	Selama pengungkapannya	Dapat membahayakan	Melindungi pertahanan dan

BIDANG INDUSTRI DAN PEDAGANGAN					
62	Dokumen Perijinan (41 jenis izin) beserta lampirannya	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkapkan data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlaku	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64	Data Debitur dana bergulir	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
65	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
66	Surat keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
67	Pasal Batas Kawasan Hutan	- UU NO .14 Tahun 2008	Selama diperkirakan	Dapat	Menjaga/melindung

		huruf c angka 6	membahayakan keamanan negara	pertahanan dan kemanan negara	keamanan negara
51	Penetapan jaringan , peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Jalur komunikasi VVIP	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54	Berita/Radiogram rahasia	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

55	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf c angka 6	Selama masih berlaku	-Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antra pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang sehat
56	Laporan studi kelayaan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan,	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 6 ayat(3) hurup b, Pasal 17	Selama masih berlaku	-Dapat menimbulkan persaingan yang	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari

	Jumlah Cadangan , Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	huruf b dan huruf d		tidak sehat antra pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya -Dapat mengungkapkan kekayaan alam	persaingan yang sehat
57	Data Teknis Potensi Air Tanah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	- Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
BIDANG PENDIDIKAN DAN PERDAGANGAN					
58	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN,dll	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60	Hasil Tes Kemampuan Fisik	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia negara
61	Hasil Reasearch and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnys sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

	Digital	tentang KIP,Pasal 17 huruf a	masih ada	menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	gi batas kawasan hutan negara
68	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/ilegal logging/ilegal trading yang masih dalam proses	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf b	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
69	Hasiol penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses dalam proses identifikasi	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk pulik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/menjaga kekayaan alam indonesia (sumber daya plasmanutfah)
70	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
71	Peta kekayaan Sumber Daya	-UU No 31 Tahun 2004	Selama diperkirakan	Mengakibatkan	Melindungi

	Kelautan dan Perikanan Laut	tentang Perikanan - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j -UU No.14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	masiha ada potensi sumber dayanya	persaingan usaha yang tidak sehat	kekayaan alam
72	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemesanan dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalaha (hasil uji)melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
73	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
BIDANG KESEHATAN					
74	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang
75		UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,Pasal 47 ayat (2) - UU NO .14 Tahun 2008	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

		tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU NO .36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			
76		- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU NO .36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
77		- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU NO .36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78		-UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c -UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	-Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
79		-UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80	Hasil audit terkait dengan medical eror	-UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek	Sampai ada persetujuan tertulis	Dapat mengungkapkan	Melindungi rahasia pribadi pasien dan

		Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 -UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i	dari pasien	rahasia pribadi pasien	citra sarana kesehatan
81	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	-UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 -UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 -UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

BIDANG SOSIAL, KETENAGA KERJAAN & PEMERDAYAAN MASYARAKAT

82	Identitas korban yang dirujuk di jaringan pelayanan terpadu (Jayandu) Winduri	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
83	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi

			n korban	pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	
84	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai penertiban keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antara pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antara pemohon bantuan
85	Hasil Dagnosa/Bedah Kasus Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
86	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
87	Usulan penetapan upah minuman dari Bupati kepada Gubernur	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

				pengungkapan secara prematur	
88	Usulan penangguhan pelaksanaan upaya minimum dari dunia usaha kepala Gubernur	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
89	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan danBAP)	UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang pengawasan Perubahan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia,Pasal 5 - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Sampai ad persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG KOMINFO					
90	Lokasi Server	-UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 25	Selama masih digunakan	-Dapat mengganggu perlindungan atas hakkekayaan intelektual -Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengerusakan	-Melindungi hak atas kekayaan intelektual -Melindungi /mengamankan perangkat serta data

				dan pencurian data)	
91	Internet Protokol/IP Address Private	-UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 25 - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan atas hakkekayaan intelektual -Mrmungkinan adanya penerobosan/pe nyalahgunakan hak akses	-Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindung gi hak akses
92	Bandwidth Management	-UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 25 - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan atas hakkekayaan intelektual -Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas badwidth di luar ketentuan	-Melindungi hak atas kekayaan intelektual -Mengatur kestabilan penggunaan badwidth
93	Sistem Management Database	-UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 25 - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan atas hakkekayaan intelektual -Dapat mengganggu	-Melindungi hak atas kekayaan intelektua -Mejaga keamanan jaringan komputer

				keamanan jaringan komputer	
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					
94	Rencana Penerbitan/Pemindahan dan Penegakan pada objek tertentu	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	-Dapat mengambat proses penegakan hukum -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95	Informasi perkara penganggaran perda yang sedang ditagani PPNS	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	-Dapat mengambat proses penegakan hukum -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
96	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Sampai selesai kasusnya	-Dapat mengambat proses penegakan hukum -Dapat menghambat	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan

				kesuksesan proses penyusunan kebijakan	untuk melaksanakan operasi
97	Informasi data pribadi penegak perda	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h ,huruf a dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	-Dapat mengambat proses penegakan hukum -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan -Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum	-Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda) -Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
98	Berita Acara Pemeriksaan	-UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h ,huruf a dan huruf i	Selama proses pemeriksaan	-Dapat mengambat proses penegakan hukum -Dapat mengungkap rahasia pribadi objek	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi objek terperiksa
99	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan dipersidangan	-UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 1981,Pasal 70 ayat (2)	1 tahun	-Dapat mengambat proses penegakan hukum	-Memperlancar proses penegakan hukum

		-- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i			
BIDANG KEUANGAN					
100	Rencana pelaksanaan tukar-menukar /pemindah tanganan barang daerah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
101	Database Objek Pajak dan Restribusi	-UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 40 - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Sampai ada pemerintah dari penegak hukum/yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi /mengamankan database objek pajak dan restribusi
102	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemeirntah	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentanan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
103	Rician Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
104	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat meghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin objektifitas penilaian/evakuasi penawaran

105	Susunan kepentingan pengadaan barang/jasa melalui (LPSE)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
106	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan)pribadi
107	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	-UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,pasal 31 ayat (1) - UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
108	Kertas Kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya,review laporan keuangan	- UU NO .14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA